

BAB I

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis menetapkan “Pergantian Kepemimpinan Jepang Pasca Pemilu Majelis Tinggi 2007” menjadi judul penelitian ini. Alasan pertama yaitu kemenangan DPJ pada pemilu majelis tinggi Jepang membawa perubahan yang signifikan pada politik di Jepang. LDP menguasai majelis rendah sedangkan DPJ yang merupakan partai oposisi menguasai majelis tinggi Jepang. LDP yang selama ini menguasai pemerintahan selama 50 tahun lebih terpaksa harus mengakui kemenangan DPJ dalam pemilu majelis tinggi di Jepang. Sehingga LDP harus berbagi kekuasaan dengan DPJ yang selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan di Jepang.

Alasan yang kedua adalah Jepang saat ini mengalami krisis politik yang berkepanjangan yang mengakibatkan dua perdana menteri Jepang yaitu Yasuo Fukuda dan Shinzo Abe mengundurkan diri. Pergantian Kepemimpinan memang seringkali dialami oleh Jepang pasca perang dunia II. Banyak sekali perdana menteri yang mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam pemerintahannya. Akan tetapi, pasca pemilu majelis tinggi 2007 pergantian kepemimpinan terjadi terus menerus dan dalam waktu yang sangat singkat.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“PERGANTIAN KEPEMIMPINAN JEPANG PASCA PEMILU MAJELIS TINGGI 2007”**.

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian kepemimpinan di Jepang merupakan hal yang sangat sering terjadi dan merupakan bagian dari dinamika politik yang ada di Jepang. Pergantian kepemimpinan ini sudah sering terjadi bahkan semenjak sudah disahkannya konstitusi meiji dan berlanjut hingga dibuatnya konstitusi 1947. Pergantian kepemimpinan di Jepang menunjukkan bahwa Jepang tidak memiliki suatu kepemimpinan yang kuat sebab Jepang terus menerus mengalami pergantian kepemimpinan.

Yoshiroo Mori merupakan pemimpin Jepang yang ke 85 dan 86. Yoshiroo Mori diangkat sebagai Perdana Menteri (PM) pada tanggal 5 April 2000 untuk menggantikan Keizo Obuchi yang sakit akibat terserang stroke sehingga tidak mampu memimpin Jepang tanggal 1 April 2000 dan akhirnya meninggal tanggal 14 Mei 2000. Pemerintahan Mori mulai mengalami hambatan ketika ia memaksakan diri untuk terus melanjutkan pemerintahannya sebagai PM, padahal banyak desakan baik dalam tubuh LDP sendiri dan partai oposisi yang menghendaki Mori untuk mengundurkan diri. LDP sangat kecewa pada buruknya kinerja Mori dan kabinetnya yang sama sekali tidak membawa kemajuan bagi Jepang.

Perilaku Mori dan anggota kabinetnya sama sekali tidak mencerminkan kepemimpinan yang bersih dan efektif. Mori misalnya melakukan perjudian melalui taruhan dalam permainan golf. Kasus taruhan itu menjadi sangat sensitif karena berlangsung ketika Mori menerima kabar tabrakan kapal latihan perikanan Jepang dengan kapal selam nuklir AS di lepas

pantai Hawaii.¹ Kredibilitas Mori selaku perdana menteri jatuh hingga titik paling rendah dalam sejarah politik Jepang modern karena skandal penyuaipan dan penggelapan yang melilit kabinetnya. Skandal itu memaksa tiga anggota parlemen dari LDP dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Jepang mundur.²

Dengan terjadinya skandal perjudian yang melibatkan PM Mori dan terjadinya skandal korupsi itu membuat dukungan masyarakat terhadap PM Mori semakin mengalami penurunan. Hal ini tentu saja membahayakan eksistensi LDP sebagai partai yang berkuasa di Jepang. Semakin merosotnya dukungan terhadap Mori otomatis akan berpengaruh pada merosotnya dukungan terhadap LDP. Itu tentu saja dapat mempengaruhi perolehan suara LDP pada pemilu Majelis Tinggi yang akan dilaksanakan Juli 2001. Tekanan yang diberikan pihak LDP ini membuat PM Mori akhirnya mengundurkan diri pada 26 April 2001.

Junichiro Koizumi terpilih menjadi PM Jepang tanggal 26 April 2001. Koizumi terpilih menjadi PM Jepang baru menggantikan Yoshiroo Mori yang mengundurkan diri. Terpilihnya Junichiro Koizumi sebagai perdana menteri Jepang telah memberikan harapan baru bagi perkembangan perekonomian Jepang. Junichiro Koizumi merupakan perdana menteri Jepang yang mampu mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir tahun 2006.

¹ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0102/23/opini/taju04.htm> Akses Data 11 Mei 2009

² <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/03/19/LN/mbm.20010319.LN78748.id.html> Akses Data 11 Mei 2009

Koizumi merupakan pemimpin Jepang yang sangat kuat di Jepang. Dia memiliki ideologi yang kuat dan pendirian sangat teguh. Koizumi meyakini bahwa ia mampu mempertahankan jabatan hingga masa jabatannya berakhir. Pada masa pemerintahan Koizumi Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang sangat cepat. Itu dikarenakan koizumi menawarkan program ekonomi yang sangat mewakili kepentingan rakyat.

Koizumi mampu menciptakan suatu pemerintahan di Jepang yang sangat stabil. Pada pemerintahannya Koizumi mampu mempertahankan dukungan masyarakat Jepang sebab dukung masyarakat Jepang terhadapnya merupakan faktor kunci keberlangsungan pemerintahannya. Ketika Koizumi mulai menyadari bahwa popularitasnya semakin menurun Koizumi memanfaatkan peranan dari media massa untuk menciptakan citra yang positif di mata masyarakat Jepang sehingga masyarakat Jepang terus memberikan dukungan kepada Koizumi. Pemerintahan Koizumi ini merupakan pemerintahan terlama di Jepang Koizumi berhasil mempertahankan kedudukannya hingga masa jabatannya berakhir.

Tanggal 20 September 2006, Sekretaris Kabinet Jepang Shinzo Abe terpilih menjadi ketua LDP menggantikan Junichiro Koizumi, yang telah mengakhiri jabatannya karena tidak bersedia dipilih kembali. Dalam pemilihan ketua LDP Shinzo Abe telah mengalahkan Taro Aso (Menteri Luar Negeri) dan Sadakazu Tanigaki (Menteri Keuangan). Shinzo Abe kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang melalui voting di Parlemen (dukungan 339

suara dari 475 anggota) dan *Upper House* (136 suara dari 240 anggota) pada tanggal 26 September 2006.³

Pada pemerintahan Abe dilaksanakan pemilu Majelis Tinggi pada tanggal 29 Juli 2007. Pasca pemilu majelis tinggi 2007, pemerintahan Shinzo Abe mulai mengalami perubahan. Abe yang terpilih menjadi PM Jepang tanggal 26 September 2006 menyadari bahwa kekalahan telak dalam Majelis Tinggi bulan Juli lebih diakibatkan pada dua hal substansial, yakni kekacauan dalam sistem pencatatan data pensiun dan skandal politik serta korupsi yang melibatkan beberapa menteri dalam jajaran kabinetnya. Terkait hal tersebut, Abe kemudian mulai mencoba berbagai cara untuk mengembalikan kredibilitas pemerintahannya.⁴

Pasca pemilu majelis tinggi Jepang Shinzo Abe melakukan *reshuffle* kabinet untuk menyelamatkan popularitas LDP di mata masyarakat Jepang. Namun itu justru mengungkap skandal korupsi yang dilakukan oleh menteri pertanian Takehiko Endo. Selama Shinzo Abe menjabat sebagai perdana menteri telah terjadi tiga skandal korupsi yang melibatkan tiga menteri pertanian yang berbeda secara berurutan yaitu Toshikatsu Matsuoka, Norihiko Akagi, dan Takehiko Endo. Pada tanggal 12 September 2007 PM Shinzo Abe akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawabnya sebagai perdana menteri atas kekacauan politik yang terjadi di Jepang.

³ Irsan, Abdul, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*, Grafindo Khazanah Ilmu, 2008 hal 138-139

⁴ www.kompas.com, *Keputusan Mundur Abe* data akses 3 Desember 2007

Tanggal 25 September 2007 majelis rendah parlemen Jepang menyetujui Yasuo Fukuda sebagai PM baru di Jepang. Persetujuan dari majelis rendah tersebut memastikan Fukuda sebagai pengganti Shinzo Abe yang mengundurkan diri. Dalam pemungutan suara, Fukuda meraih 330 suara sedangkan pesaingnya Taro Aso hanya mendapat 197 suara.⁵

Pemerintahan Yasuo Fukuda dipandang sebagai salah satu pemerintahan yang tidak populer di Jepang. Namun dalam segi politik luar negeri pemerintahan Yasuo Fukuda dinilai sangat berhasil. Itu dibuktikan dengan peningkatan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negaranya dikawasan Asia seperti China, Korea Selatan, Asia Tenggara, dan India. Usaha Yasuo Fukuda untuk mempertahankan pemerintahannya dan kabinetnya mulai mengalami hambatan.

Untuk mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri, Yasuo Fukuda melakukan *reshuffle* kabinet pada tanggal 1 Agustus 2008. Yasuo Fukuda melakukan *reshuffle* untuk mencegah semakin merosotnya dukungan terhadap kabinetnya serta menurunnya popularitas LDP di mata masyarakat Jepang terutama kaum petani yang telah menjadi pendukung setianya. Akan tetapi, usaha Yasuo Fukuda untuk mereshuffle kabinetnya sia-sia belaka dan puncaknya pada 1 September 2008 Yasuo Fukuda akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan pengunduran diri Yasuo Fukuda ini membuat situasi politik di Jepang mengalami kekacauan.

⁵ <http://hariansib.com/2007/09/26/majelis-rendah-jepang-setujui-fukuda-sebagai-pm/> akses data 10 September 2008

Pengunduran diri dua perdana menteri pasca pemilu majelis tinggi menyebabkan Jepang kehilangan sosok perdana menteri yang memiliki pendirian yang kuat dan tegas setelah mantan PM Junichiro Koizumi tidak bersedia menjabat kembali menjadi PM dua tahun yang lalu. Kehilangan sosok Koizumi membuat masyarakat Jepang menjadi khawatir akan masa depan politik Jepang yang dikuasai LDP. Pesimistis masyarakat Jepang terhadap kehidupan politiknya berakibat pada menurunnya popularitas LDP dan PM Jepang yang sedang menjabat.

Kepemimpinan Politik yang lemah, bagi banyak negara merupakan masalah domestik.⁶ Pergantian kepemimpinan di pemerintahan Jepang memang seringkali terjadi. Pergantian tersebut terjadi rata-rata diakibatkan oleh berbagai skandal, pertikaian antar faksi di LDP dan kegagalan dalam memerintah yang dialami oleh Perdana Menteri (PM) Jepang terdahulu. Namun Pasca pemilu Majelis Tinggi pergantian kepemimpinan di Jepang relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat dibandingkan sebelum pemilu. Shinzo Abe yang merupakan PM Jepang ke 90 yang hanya mampu menjabat selama 1 tahun saja sedangkan Yasuo Fukuda hanya mampu menjabat dalam kurun waktu kurang dari setahun. Hal ini menyebabkan Jepang berada dalam posisi yang dilematis sebab ketika Jepang berusaha bangkit dari krisis kepemimpinan yang dialami selama berkali-kali namun justru Jepang terjebak pada pengunduran dua Perdana Menteri yang dilakukan secara berturut-turut pasca pemilu Majelis Tinggi 2007.

⁶ Ichiro Ozawa, *Blueprint Jepang Masa Depan*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal 3

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah: **“Mengapa Pergantian Kepemimpinan di Jepang Terjadi Dalam Waktu Relatif Singkat Pasca Pemilu Majelis Tinggi 2007?”**

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab Rumusan Permasalahan diatas dan menjelaskan fenomena terjadinya Pergantian Kepemimpinan di Jepang diatas maka akan digunakan Konsep Sistem Kepartaian dan Konsep Sistem Pemilihan Umum.

a. Konsep Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu *Single-member Constituency* (sistem distrik) dan *Multi-member Constituency* (Sistem Proporsional).⁷

1. Sistem Distrik

Pada sistem distrik, satu distrik pemilihan memilih 1 wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar

⁷ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 417

distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya.⁸ Peserta yang memperoleh suara terbanyak akan memenangkan pemilu walaupun hanya terpaut sedikit suara dari para saingannya. Suara bagi peserta yang kalah akan hilang dan tidak dapat digabungkan dengan partainya distrik lain sehingga pemenang yang mendapatkan segalanya atau disebut *the winner takes all*.

2. Sistem Proporsional

Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Pada sistem proporsional satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu.⁹ Sistem proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penduduk pada daerah pemilihan jika penduduk berjumlah banyak maka kursi yang diperebutkan pun akan banyak. Suara para peserta pun tidak akan hilang karena akan tetap dijumlah. Hal ini berbeda sekali dengan sistem distrik yang suara peserta yang kalah akan hilang.

Jepang menganut sistem pemilu yang merupakan gabungan dari sistem distrik dan sistem proporsional. Berdasarkan UU Pemilu 1993 Majelis Rendah (*House of Representatives*), yang saat ini beranggotakan 480 orang, dan dari 300 distrik pemilihan Single Member dan 11 daerah

⁸ Prof. Miriam Budiardjo *op cit* hal 462

⁹ *Ibid* hal 462-463

pemilihan dengan sistem *Proportional Representation (PR)*. Dengan perincian 300 dipilih dari sistem distrik *single member* dan 180 tersedia dalam sistem PR.¹⁰

Dengan menggunakan sistem distrik itu setiap prefektur Jepang terbagi menjadi distrik-distrik pemilihan. Jumlah daerah pemilihan di setiap prefektur (ada 47 prefektur di Jepang), kemudian 253 daerah lainnya didistribusikan ke tiap prefektur sesuai dengan jumlah penduduknya. Sedangkan untuk sistem PR, Jepang dibagi menjadi 11 blok daerah pemilihan. Jumlah kursi tiap daerah pemilihan juga didistribusikan sesuai dengan jumlah penduduk di tiap daerah tersebut.

Dalam pemilihan umum untuk Majelis Tinggi, 146 kursi dari 242 kursi anggota Majelis tinggi dipilih dengan menggunakan *Local Constituency System* dari 47 prefektur di Jepang prefektur yang paling kecil memilih satu councilor setiap kali pemilihan dan prefektur yang paling banyak penduduknya memilih empat. Perbedaan *Councilor* yaitu, paling sedikit 2 dan paling banyak 4, dan ini sering tidak menggambarkan jumlah penduduk sebenarnya. Sedangkan sisanya 96 kursi dipilih dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional.¹¹

Reformasi sistem pemilu Jepang tahun 1993 membuat transisi sistem centrifugal yang dianut di Jepang menjadi centripetal.¹² Hal ini membuat partai oposisi di Jepang seperti Japan Communist Party (JCP),

¹⁰ Usmar Salam, *Reformasi Politik dan Keberadaan Koenkai di Jepang*, Laporan Penelitian FISIPOL UGM, 1999, hal 35

¹¹ *Ibid* hal 35

¹² <http://www.fpri.org/enotes/200808.saito.electionsjapanforeignpolicy.html> Akses Data 02 Maret 2009

Social Democratic Party (SDPJ), dan juga DPJ berusaha untuk memperoleh kekuasaan guna untuk membuat suatu perubahan bagi kemajuan bangsa Jepang. Ketika diterapkannya UU pemilu baru itu membuat partai oposisi JCP dapat memperoleh kursi yang cukup banyak itu dikarenakan dengan dianutnya sistem centripetal itu membuat JCP mampu memperoleh kursi di daerah-daerah pusat tidak hanya di daerah yang menjadi basisnya seperti daerah yang banyak buruhnya. Berbeda dengan JCP, DPJ meskipun dengan diterapkannya single non-transferable vote (SNTV) yang lama DPJ tetap mampu meraih kursi yang cukup banyak karena basis dukungan mereka berada di mana-mana.

Namun dengan perubahan sistem pemilu ini membuat DPJ semakin memperoleh dukungan dari masyarakat Jepang itu dibuktikan ketika DPJ memenangkan pemilu pada Majelis Tinggi 2007. DPJ mampu meraih dukungan dari berbagai kalangan bukan hanya warga kota yang selama ini menjadi basis dukungannya namun juga para petani. Perubahan sistem pemilu ini juga memberikan dampak yang sangat besar karena DPJ dapat meraih dukungan di daerah-daerah. Sistem ini sangat mendukung bagi partai-partai yang berhaluan kanan sedangkan bagi yang berhaluan kiri justru sangat merugikan karena dengan sistem ini hanya memberikan kesempatan pada partai besar untuk menguasai pemerintahan.

Pasca kemenangan DPJ pada pemilu Majelis Tinggi 2007 membuat peningkatan pada posisi tawar DPJ. Sehingga DPJ mampu

memberikan penolakan akan adanya ajakan koalisi LDP untuk bergabung dalam pemerintahannya. Dengan penolakan ajakan berkoalisi ini tentu saja berpengaruh pada pergantian kepemimpinan karena DPJ mampu menghalangi Pemerintah untuk membuat suatu RUU yang akan beimplikasi pada singkatnya masa jabatan. Sebab itu justru berakibat pada pergantian kepemimpinan di Jepang.

b. Konsep Sistem Kepartaian

Sistem Kepartaian (*Party System*) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu:¹³

1. Sistem Partai Tunggal

Apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik saja yang berperan, maka di negara tersebut dapat dinyatakan menganut sistem partai tunggal, mungkin di negara tersebut benar-benar hanya terdapat satu partai politik saja; akan tetapi mungkin pula terdapat beberapa partai politik namun yang mempunyai peran hanya satu partai politik saja. Di negara-negara yang terdapat satu partai politik yang dominan (negara tersebut dapat dinyatakan menganut sistem partai tunggal), pada awalnya menganut sistem multi partai atau banyak partai, akan tetapi dalam perkembangannya hanya terdapat satu partai politik saja yang selalu memenangkan mayoritas suara dengan meninggalkan partai-partai lainnya jauh di

¹³ Prof. Miriam Budiardjo *op cit* hal 462

belakang.¹⁴ Hal itu menyebabkan partai yang dominan tersebut selalu memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan sehingga membuat partai-partai kecil tidak dapat bersaing dengan partai dominan tersebut.

2. Sistem Dwi Partai

Pada umumnya sistem dwi partai dianut oleh suatu negara di mana terdapat dua partai politik yang memainkan peran di kehidupan politik. Sistem dwi partai ini dapat pula dianut oleh suatu negara yang mempunyai beberapa partai politik (lebih dari dua), akan tetapi yang memainkan peran dibidang kehidupan politik hanya dua partai saja, sedangkan partai-partai yang lainnya merupakan partai-partai minoritas yang perannya sangat kecil.¹⁵

Sistem dwi partai dapat berjalan apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen (*social homogeneity*), adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik (*political consensus*), dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*).¹⁶

3. Sistem Multi Partai

Pada umumnya sistem multi partai ini dianut suatu negara di mana di negara tersebut terdapat beberapa partai politik (lebih dari dua), dan diantara partai-partai politik yang ada itu memiliki kekuatan yang seimbang. Pada umumnya negara-negara yang

¹⁴ Drs. Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 98

¹⁵ *Ibid* hal 99

¹⁶ Prof. Miriam Budiardjo, *op cit* hal 417

mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa akan mempunyai kecenderungan sebagai negara yang menganut sistem multi partai.¹⁷ Sistem multi partai ini dapat menyebabkan kondisi politik tidak stabil akibat terjadinya persaingan antar partai politik dalam pemerintahan.

Jepang merupakan negara yang menganut sistem kepartaian yang selalu berubah-ubah. Dimulai dengan menggunakan sistem multi partai kemudian berubah menuju sistem partai tunggal dan sekarang menggunakan sistem dwi partai. Penentuan sistem kepartaian di Jepang berdasarkan praktek kekuasaannya. Jadi ketika dalam pemerintahan Jepang sedang didominasi oleh LDP maka sistemnya yang digunakan merupakan partai tunggal karena LDP mendominasi dalam pemerintahan sehingga tidak memberikan porsi kekuasaan pada partai lain. Kemenangan DPJ dalam pemilu Majelis tinggi mampu menciptakan arah baru dalam sistem kepartaian di Jepang. Sebab dengan kemenangan tersebut DPJ mampu menguasai Majelis Tinggi.

Sistem dua partai yang dianut ini tentu saja memberikan hambatan bagi pemerintahan LDP di Jepang. Sebab dengan kedua Majelis tidak lagi dikuasai oleh kekuatan yang sama DPJ dapat dengan mudah menghalangi jalannya proses pemerintahan di Jepang. Penolakan DPJ untuk mengesahkan RUU MSDF di Majelis Tinggi membuat LDP mengalami hambatan yang sangat besar karena ini dapat mengancam

¹⁷ Drs. Haryanto, *op cit* hal 100.

hubungan bilateral AS-Jepang. Sehingga ketika LDP mengajukan rencana koalisi besar dengan DPJ sistem dua partai ini terancam bubar. Akan tetapi DPJ secara cepat menolak tawaran ini sehingga posisi tawar DPJ di pemerintahan semakin meningkat. Dengan konsep sistem dua partai ini tentu akan mempengaruhi pergantian kepemimpinan sebab DPJ akan terus berusaha untuk menjegal setiap usaha pemerintah Jepang untuk membuat suatu kebijakan. Dengan adanya penjagalan kebijakan membuat kredibilitas pemerintahan PM Shinzo Abe dan PM Yasuo Fukuda mengalami penurunan yang nantinya akan berimplikasi dengan berkurangnya dukungan masyarakat sehingga kedua PM tersebut mengundurkan diri secara cepat.

c. Konsep Pembagian Kekuasaan

Pembagian Kekuasaan dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu:

1. Secara Vertikal

Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*). Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal.¹⁸

¹⁸ Prof. Miriam Budiardjo *op cit* hal 267

2. Secara Horisontal

Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin *trias politica*. *Trias Politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁹

Dengan berkembangnya konsep mengenai negara kesejahteraan (*Welfare State*) maka saat ini *trias politica* tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of power*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda (*distinct hands*), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.²⁰

Pembagian kekuasaan di Jepang antara pihak legislatif dan eksekutif sangat berpengaruh bagi pergantian kepemimpinan di Jepang. Itu dikarenakan dalam pembuatan suatu undang-undangan kerjasama antara Diet dan Pemerintah sangat diperlukan. Tanpa kerjasama itu suatu RUU tidak akan berhasil disahkan. Peranan diet dalam pembuatan

¹⁹ Prof. Miriam Budiardjo *op cit* hal 281

²⁰ *Ibid* hal 281-282

keputusan sangatlah penting sebab dietlah yang akan menyetujui atau menolak pembuatan RUU tersebut. Apabila salah satu majelis menolak terhadap rancangan tersebut maka rancangan itu tidak dapat disahkan dan dikembalikan lagi pada pemerintahan. RUU MSDF yang diajukan oleh pemerintahan Jepang ditolak oleh partai oposisi DPJ. Penolakan yang terjadi itu tentu saja menghambat pemerintahan LDP yang berkuasa. Dengan adanya blokade itu tentu saja berpengaruh pada hubungan aliansi AS dan Jepang. Selain itu RUU perpanjangan bensin dan RUU pengeluaran keuangan yang diajukan pemerintah juga terus ditolak oleh DPJ di Majelis tinggi.

Pembagian kekuasaan itu sangat berpengaruh bagi pergantian kepemimpinan di Jepang sebab jika tidak adanya kerjasama antara kedua majelis dan pemerintah dalam merumuskan suatu RUU maka RUU tersebut tidak dapat disahkan. Perdana Menteri Jepang berusaha untuk membuat kebijakan demi mensejahterakan masyarakatnya akan tetapi jika kebijakan tersebut dihambat oleh DPJ yang menguasai Majelis Tinggi maka Perdana Menteri tidak dapat membuat kebijakan apapun untuk direalisasikan pada masyarakat. Hal ini tentu akan berimplikasi pada Perdana Menteri yang berkuasa di Jepang. Seorang pemimpin Jepang yang tidak mampu membuat kebijakan apapun otomatis akan menurunkan kepercayaan publik terhadap dirinya yang tentu saja berdampak pada terhambatnya pemerintahan yang sedang berkuasa. Akibatnya Perdana Menteri yang berkuasa akan mengundurkan diri

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka penulis mempunyai hipotesa bahwa alasan pergantian kepemimpinan di Jepang terjadi dalam waktu relatif singkat pasca pemilu Majelis Tinggi 2007 yaitu dikarenakan kemenangan DPJ pada pemilu Majelis Tinggi 2007.

E. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang merupakan data sekunder baik berupa buku, makalah, jurnal, atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik yang penulis angkat.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksplanatif Research, yaitu metode atau pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dan berusaha untuk menganalisisnya dengan didukung oleh data-data yang ada.

F. Jangkauan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan agar penulis dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan, maka penelitian secara khusus membahas mengenai Pergantian Kepemimpinan Jepang Pasca Pemilu Majelis Tinggi 2007.

²¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pelajar Offset, Jakarta 1999, hal 1

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini, dibagi kedalam V Bab, masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-sub yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan**
- Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, dan Jangkauan Penulisan.
- BAB II** **Sistem Pemerintahan Jepang**
- Bab ini akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Jepang yang terdiri dari Kaisar, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- BAB III** **Pemilu Majelis Tinggi 2007**
- Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum pemilu majelis tinggi 2007, kekalahan LDP, faktor-faktor kemenangan DPJ, dan sumber-sumber dukungan DPJ.
- BAB IV** **Pergantian Kepemimpinan Jepang Pasca Pemilu Majelis Tinggi Tahun 2007**
- Bab ini akan menjelaskan secara keseluruhan alasan terjadinya Pergantian Kepemimpinan di Jepang Pasca Pemilu Majelis Tinggi Tahun 2007.
- BAB V** **Kesimpulan**